KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI WIRANTO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD.**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD.	**HERI WIRANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	90%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	50
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Rp13.281.884.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2023

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

MOH. MAHFUD MD.

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

HERI WIRANTO

DOKUMEN MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Sasaran Strategis 1	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif**
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan. 1. Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF)adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. 2. Industri pertahanan Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain.*
Sumber Data	Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Kontribusi Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan

Cara Menghitung	1. *Persentase Capaian MEF* $\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ 2. *Persentase Capaian Industri Pertahanan* $\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dok Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ 3. *Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg* $\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF + Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$
	➢ Target Nasional MEF Tahun 2023 sebesar 93% ➢ Target Nasional Inhan Tahun 2023 sebesar ≥ 50%
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \mu\,(\%)\ \textit{capaian rekomdasi kebijakan bidang hanneg sesuai dokumen perencanaan nasional}$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur sejauh mana butir-butir rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian butir-butir persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\sum = \mu\,(\%)\ \textit{capaian rekomendasi kebijakan bidang hanneg yang ditindaklanjuti}$
Sasaran Strategis 2	**Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**

Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penatan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 – 58
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; 3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5. Respon Perencana unit organisasi; 6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7. Kualitas Laporan Kinerja; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9. Respon Pengelola Monev unit organisasi.
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum.
Sumber Data	Hasil survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hanneg dari stakeholders

Cara Menghitung	Penialaian berdasarkan hasil survei Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Tata Usaha dan Umum dengan menggunakan kategorisasi skala likert: 1. 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2. 1,80-2,59 = Tidak puas 3. 2,60-3,39 = Cukup puas 4. 3,40-4,19 = Puas 5. 4,20-5,00 = Sangat puas Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut: $\sum = \frac{Indeks\ pelayanan\ Bid.ProgEv + Indeks\ Pelayanan\ \ Bid.TUM}{2}$

Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang
Koordinasi Pertahanan
Negara,

Heri Wiranto